

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Dato Iba RT 05 Samarinda 75131

Website: kel-sungai-keledang.samarindakota.go.id | e-mail: sungaikeledang88@gmail.com

Samarinda, 29 September 2022

Kepada

Nomor Lampiran Perihal

040/28/400.09.001

Usulan Daftar Informasi Yang Di

Kecualikan Tahun 2022

Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Samarinda

Menindaklanjuti surat dari Sekertariat Daerah Kota Samarinda Nomor 555/2448/100.17 tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2022, dengan ini disampaikan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2022 pada Kelurahan Sungai Keledang sebagai berikut :

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka |
|----|---|---|---|---|----------|
| | | | Dibuka | Ditutup | Waktu |
| 1. | Data Pribadi Kependudukan | Pasal17 UU No. 14 Tahun 2008 | | Dapat mengungkap rahasia pribadi | Permanen |
| 2. | Buku Register Ahli Waris | 3 | | Dapat mengungkap rahasia pribadi | |
| 3. | Dokumen pengadaan barang / jasa dari penyedia barang / jasa | | | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang- undang | |
| 4. | Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin / pelanggaran pegawai | PP No. 24 Tahun 2011 | | Proses dan hasil sengketa kepegawaianbersifat rahasia | |
| 5. | Dokumen Perjanjian Kerjasama | | 1 | Dapat merugikan kepentingan hubungan dengan pihak lain (Pihak Ketiga) | |
| 6. | Informasi mengenai rincian data kepegawaian seseorang, kecuali bagi yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian | UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h | | Dokumen yang berkaitan dengan data pribadi seseorang sifatnya rahasia | |
| 7. | Dokumen Notulen Rapat berdasarkan sifat rapat | | | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang- undang | |
| 8. | Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi aparatur | | | Dapat mengungkap rahasia pribadi / jabatan | , K |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka |
|-----|--|---|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | Waktu |
| 9. | Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur | UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h | | Dokumen hasil Wasdal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang sifatnya rahasia | N. 1 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 |
| 10. | Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat / staf | | | Dapat mengungkap rahasia pribadi / jabatan | |
| 11. | Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudited) | | | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang- undang | |
| 12. | Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password | | | Dapat merugikan system informasi badan publik serta pihak-pihak pengelola dan pengguna database dan aplikasi | |
| 13. | Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai | | | Dapat mengungkap rahasia pribadi | |
| 14. | Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang / jasa | UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j Keppres No. 54 Tahun 2010 | | Jika dibuka akan menimbulkan penilaian yang tidak objektif | |
| 15 | Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang / jasa | UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j Keppres No. 54 Tahun 2010 | | Jika dibuka akan berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat | |
| 16. | Dokumen pengajuan ijin perkawinan / perceraian | | | Dapat mengungkap rahasia pribadi | |
| 17. | Daftar Penilaian Kinerja dan Kompetensi | | | Dapat mengungkap rahasia pribadi / jabatan | |
| 18. | Arsip / surat dinamis yang menuru sifatnya rahasia | | | Dapat mengungkap rahasia Badan Publik | |
| 19. | Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha Negara, dan agama | | | Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik dapat menghambat proses menegakan hukum | |
| 20. | Evaluasi organisasi dan tata kerja | UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 6 ayat 3 huruf d dan Pasal 17 huruf i perka BKN No. 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Audit | | Untuk menghindari penyalahgunaan hasil pengawasan ataupun efek sosial yang berujung pada justifikasi publik | |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka |
|-----|---|--|---|---|--------|
| | | | Dibuka | Ditutup | Waktu |
| 21. | Dokumen kepemilikan tanah | | | Dapat mengungkap rahasia Badan Publik | |
| 22. | Hasil Pemeriksaan Keuangan Reguler | | | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang- undang | |
| 23. | Laporan Keuangan Tahun Berjalan | | | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang- undang | |
| 24. | Laporan Pelaksanaan Anggaran | | | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang- undang | |
| 25. | Berita Acara dan Penjatuhan Sanksi / Hukuman Disiplin | PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai | | Bersifat Rahasia | |
| 26. | SK Pensiun | UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 hurufi | | Produk tersebut hanya terbuka bagi ASN yang bersangkutan dan Instansi Teknis Terkait | |
| 27. | Karis, Karsu dan Karpeg | UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 hurufi | | Produk tersebut hanya terbuka bagi ASN yang bersangkutan dan Instansi Teknis Terkait Kepegawaian | |

Demikian usulan ini disampaikan agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

